

**NOTULEN PERTEMUAN ANTARA MUSPIDA PROPINSI IRIAN JAYA DENGAN  
PRESIDIUM DEWAN PAPUA  
DI GEDUNG NEGARA TANGGAL 03 OKTOBER 2000<sup>1</sup>**

**I. Pendahuluan**

Pada tanggal 3 Oktober 2000 pukul 18:00 s/d 19.45 WIT di Gedung Negara Dok V Jayapura dilaksanakan pertemuan antara MUSPIDA Propinsi Irian Jaya dengan Presidium Dewan Papua (PDP).

Dari Muspida Propinsi Irian Jaya hadir:

1. PANGDAM XVII Trikora
2. Gubernur Propinsi Irian Jaya
3. KAPOLDA Irian Jaya
4. DANLANTAMAL V Maluku Irian Jaya
5. KAJATI Irian Jaya

Dari Presidium Dewan Papua hadir:

- a. Theys Hiyo Eluay (Ketua PDP)
- b. Pdt. Herman Awom S Th.
- c. Ny. Beatrix Koibur
- d. Drs. Willy Mandowen
- e. Drs. Don Flassy, MA

**II. Kronologis Kegiatan:**

- a. Pada pukul 18.15 WIT pertemua dibuka oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya, yang menyampaikan selamat sore dan selamat datang kembali di Indonesia bagi anggota Presidium Dewan Papua yang baru kembali dari lawatan di Luar Negeri. Seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur beberapa hari sebelumnya, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak, ibu dari PDP kepada Panglima Kodam XVII/Trikora atau KAPOLDA.
- b. Penyampaian Drs. Willy Mandowen :
  1. Surat Kapolres pertemuan Bapak Kapolda dan juga merespon pertemuan Kapolri, September 2000 di Jakarta dengan Wakil Presiden tentang pelarangan pengibaran Bendera Bintang Fajar Papua dan kemarin Bapak Theys, terima kasih atas koordinasinya yang baik. Pihak-pihak yang lain, memberikan teks kepada kami sehingga kami mengkoordinasikan dengan Bapak Kapolda, sehingga kami anggota Presidium ada kesepakatan dantidak ada masalah setelah pulang dari Luar Negeri kami seyogyanya akan bertemu dengan Menkosospolkam dan kami akan memahami, Menkosospolkam juga minta maaf karena berada di NTT karena kaitannya dengan kasus Atambua. Komitmen dari PDP melaksanakan pertemuan sendiri sebelum melaksanakan pertemuan dengan Muspida, sehingga tahapan pertahapan penyelesaian masalah yang dijumpai jangan dipahami sepihak dengan sejumlah pejabat yang ada di dalam lingkaran Kabinet yang baru dan kita tunda sampai beberapa hari lagi kita laksanakan kalau tidak ada halangan kami minta waktu tanggal 9 Oktober 2000 Pak.

---

<sup>1</sup> Disalin sesuai aslinya oleh Tim Kemanusiaan Wamena Bagian Investigasi

2. Pertemuan dengan Menko Polsoskam itu, di dalamnya soal bendera, soal Nama kami ingin pertegas kembali. Dulu Presiden melalui Pak Marsilam Simanjuntak telah mengumumkan secara resmi bahwa tuntutan bagi masyarakat itu adalah HAM. Kapolres seolah menyerang dan menurunkan bendera secara paksa sehingga terjadi korban masyarakat yang menghalau. Katakanlah batas waktunya tanggal 5 Oktober 2000, kami diberikan batas waktu oleh Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan. Hal ini perlu sehingga masyarakat dapat memahami seperti Bapak Presiden mengatakan kalau memang perlu dibicarakan atau ada keputusan yang semisalnya diterjemahkan dalam hukum TNI dan proporsional. Kalau tidak Bapak Kapolri jangan sepihak melakukan sesuatu yang pada akhirnya menurunkan kredibilitas Pemerintah di masyarakat, sehingga masyarakat kita mengkait-kaitkan rakyat, sekarang itulah yang menjadi inti atau garis besar pokok permasalahan. Sudah ada pertemuan dengan Muspida untuk menyatakan sambutan kepada tanggal 1 Desember 2000. Banyak sekali persepsi yang keliru, termasuk terhadap hasil-hasil Kongres Papua, mereka pikir sudah merdeka padahal di dalam resolusi itu sebenarnya ada tertulis hanya evaluasi terhadap proses damai perjuangan Papua Merdeka. Apakah dilakukan secara dialog politis, inilah yang saya kira menjadi bagian penting dalam pembicaraan nanti dengan Bapak-bapak Muspida sehubungan dengan Papua Barat sehingga menjadi pemahaman bersama kita, sama-sama mengantisipasi kita lihat dengan soal bendera kalau diturunkan secara paksa maka akan menyebabkan proses dialog ini, akan terhambat. Demikian Bapak-bapak sekalian.

c. Theys Hiyo Eluay menyampaikan:

1. Mengenai surat Presidium merestui , ada petunjuk jadi jangan ada tindakan dari Polri.
2. Bendera Bintang Kejora di setiap Kabupaten, dikibarkan bersama bendera Merah Putih dan kalau diturunkan masyarakat akan mengamuk:
  - a) Mengenai lambang Papua dan bendera Papua masyarakat akan berbondong-bondong ke seluruh Polsek dan Polres untuk minta dijelaskan karena ini menyangkut harga diri dan yang kedua kalau bukan itu maka kita mengungsi secara besar-besaran, kita tinggalkan Papua dari Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Jayapura mengungsi secara besar-besaran.
  - b) Agak penasaran tentang tindak lanjut maka kami minta kepada Pemerintah untuk memberikan waktu untuk bertemu dengan Bapak Presiden karena beliaulah selanjutnya memberi kejelasan tentang bagaimana model Papua ini yang bagaimana nah inilah rencana kita.
  - c) Bapak Panglima, Bapak Gubernur bersama jajaran Muspida surat Surat Bapak Kapolres ditujukan Bapak Kapolda, pelaksanaannya ditangguhkan sehingga rakyat tidak panik dengan adanya penambahan Pasukan, terutama Polisi karena kami merasa di sini aman dan jangan ada dusta di antara kita, artinya kalau kondisi kita aman sekali, tidak perlu ada penambahan pasukan, ini kalau Bapak-bapak Muspida mau mendengar suara rakyat karena bagaimanapun juga Bapak-bapak adalah pelayan-pelayan rakyat tetapi tidak apa-apa.
  - d) Mengenai nama Papua tidak ada hubungannya dengan Papua Merdeka, karena kalau dipanggil Irian merasa berdosa, karena dia bukan orang Jawa, tidak karena dia orang Irian merasa tidak dihargai karena dia mempunyai harga diri dan tidak ada anti Niderland dan kalau bendera Papu turun maka Merah Putih juga harus turun .

d. Pdt. Hermanus Awom Menyampaikan :

1. Supaya ada Notulen tertulis setiap pertemuan tentang kesepakatan tanggal 19 Agustus 2000 setiap ada kejadian harus ada koordinasi seperti tanggal 22 Agustus 2000.
2. Supaya perintah penurunan Bendera disosialisaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada korban lagi, sebab masyarakat sudah dikelilingi pasukan.
3. Permintaan penambahan Militer ada ditangan iapa supaya masyarakat jangan dibunuh lagi, Peristiwa Hamadi penurunan Bendera dengan tidak sopan. Theys Eluay siap kalau tanggal 12 membubarkan Dewan Papua Irja, selanjutnya Gubernur supaya dibuat kronologi selanjutnya disebarkan kepada PDP.

e. Kapolda Irja Menyampaikan :

- 1) Tanggal 26 September 2000 serah terima Kapolri dan tanggal 27 September 2000 Kapolri memberi brifing khusus kepada Aceh, Irian dan Maluku top dilaksanakan pendekatan melalui kasih sayang, tindak tegas penurunan bendera.
- 2) Brifing harus dilaksanakan, untuk diberikan kejelasan sambil berusaha menjelaskan pendekatan kasih sayang kepada beliau-beliau di Pusat, serta ancaman Kapolres masih perlu disosialisasikan bukan merupakan harga mati.
- 3) Setiap pertemuan dalam membahas kasus-kasus supaya dibahas secara kasuistis. Penurunan bendera di Hamadi sudah didahului dengan pengiriman surat teguran namun tidak ditanggapi.
- 4) Upaya yang dilakukan oleh apkam adalah pendekatan dengan melakukan dialog agar bendera tersebut diturunkan atau tetap berdiri dan kemudian ditunda 2 (dua) minggu sambil kedua belah pihak memberikan penjelasan kepada Presiden (5 – 7 – 2000).
- 5) Kasus Sorong – pdt. Mambrasar melaporkan ke Kapolres tentang penaikan bendera Papua digerejanya. Polisi datang langsung diserbu olh masyarakat, sehingga harus mempertahankan diri.
- 6) Supaya tidak ada korban harus ada yang dikorbankan (kompromi).

f. Gubernur Propinsi Irian Jaya menyampaikan peristiwa Sorong September 2000, Polisi diancam akan dibacok karenanya melakukan pembelaan diri.

g. Pangdam XVII / Trikora Menyampaikan :

- 1) Ada pihak-pihak tertentu yang mau mencoba merusak kekompakan.
- 2) Surat yang ada tidak sesuai dengan pola dan tulisan militer, kalau ada kecurigaan dapat diadakan dialog secara damai.
- 3) Tidak ada penambahan pasukan yang ada hanya pergantian Pasukan karena sudah 10 bulan, jadi memang perlu diganti.

h. Kajati Irian Jaya menyampaikan : kita mengharapkan kedamaian di daerah ini dan jangan terus melakukan pelanggaran, apabila ada pelanggaran perlu segera ditindak lanjuti.

i. Gubernur Propinsi Irian Jaya menyampaikan :

- 1) Penundaan penurunan bendera selama dua minggu.
- 2) PDP supaya menyampaikan kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah tentang bendera Bintang Gejora.
- 3) Pelantikan Gubernur, diperkirakan tidak mungkin tanggal 10 Oktober 2000.

4) Pengungsi Ambon yang sudah kembali upaya dilaporkan Pdt. Hermanus Awom.

j. Drs. Don Flassy MA menanyakan, ada apa pesawat terbang rendah sehingga membuat panik masyarakat.

k. Pangdam XVII / Trikora menyampaikan pesawat tersebut mendeteksi pelanggaran dengan menggunakan radar dan masyarakat menanggapi keberadaan pesawat itu seolah-olah ada apa-apa.

l. Pdt. Hermanus Awom menyampaikan :

- 1) Kasus penurunan bendera di Hamadi PDP tidak diberitahukan dan PDP juga tidak turun untuk mensosialisasikan.
- 2) Diberikan perpanjangan waktu 2 (dua) minggu untuk maksud tersebut tidak mungkin, sebaiknya waktu perpanjang karena tidak mudah untuk bertemu dengan Presiden.
- 3) Letak geografi daerah yang sulit sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan masyarakat.

m. Kapolda Irian Jaya menyampaikan, rencana perpanjangan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2000, bukan harga mati masih bisa dibicarakan lagi nanti.

n. Drs. Willy Mandowen menyampaikan, sosialisasi perlu waktu untuk bendera tidak boleh dijadikan alasan untuk membunuh.

o. Gubernur Irian Jaya menyampaikan :

- 1) Tanggal 1 Desember 2000 damai (tidak ada apa-apa), perlu dimuat di media cetak agar masyarakat mengetahuinya.
- 2) Hak politik, diselesaikan secara damai serta pembangunan dilaksanakan disosialisasikan kepada berbagai pihak sehingga mereka mengetahui.

p. Rektor Uncen menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Perlu diberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sudah disepakati di tingkat pimpinan (penjelasan pemerintah yang baik kepada masyarakat).
- 2) Ada pihak yang ingin memaksakan kehendaknya untuk merusak komunikasi yang ada.

### **III. Kesimpulan.**

- 1) Batas waktu penurunan Bintang Fajar diperpanjang dari tanggal 5 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2000, namun tanggal dimaksud bukan merupakan harga mati.
- 2) Presidium Dewan Papua dan Muspida Propinsi Irian Jaya masing-masing akan menghadap Presiden untuk meminta petunjuk tentang masalah pengibaran bendera Papua.

Jayapura, 7 Oktober 2000.  
Notulis

Ttd

Ir. SABIRIN HARAHAP, M.Mt